

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi praktek universal suffrage (pemilu). Namun, sistem pemilu demokratis bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ini ditentukan oleh konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing negara-bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya. Dengan demikian, proses politik atau pemilu yang berlangsung setiap lima tahun ini memiliki persamaan hak di kursi pemerintahan. Pemilihan umum serentak tahun 2019 yang di dasarkan pada jadwal pemilihan pemimpin politik Indonesia juga mulai diperjelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kodifikasi hukum yang terkandung dalam undang-undang ini memudahkan proses siklus demokrasi Indonesia. Pada penelitian ini pentingnya perempuan di ikutsertakan dalam sebuah pemilu atau pemilihan umum di Indonesia khususnya di setiap daerah akan menjadai salah satu hal yang dapat berpengaruh bagi masyarakat serta instansi-instansi pemerintahan karena pada dasarnya perempuan jarang di ikutsertakan dan dapat kita lihat bahwa tidak sedikit perempuan yang mempunyai keinginan dan mempunyai kinerja dalam aspek apapun. Pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya keewakilan perempuan salahsatu instansi lembaga politik yang mana dalam hal ini penting juga perempuan untuk di libatkan, perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai di akomodir dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian partai politik, serta kepengurusan partai politik di pusat dan daerah. (Artina, 2006)

Keterwakilan perempuan pada pemilu UU HAM, UU RI No. 39 Tahun 1999, memuat pasal khusus tentang hak-hak perempuan. Pasal 46 bagian ini menyatakan bahwa sistem pemilihan, partai, pemilihan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dan Pasal 49 menyatakan bahwa perempuan berhak memilih, memilih dipilih, diangkat untuk pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai

dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perempuan wajib diikutsertakan dalam pendirian dan pembentukan partai politik, dan Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa perempuan wajib diikutsertakan dalam kepengurusan partai politik di tingkat nasional. tingkat keterlibatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). sehingga sebagai akibat dari ketentuan ini, perempuan dapat mengelola partai politik. Sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1) yaitu peningkatan bakal calon anggota yang mana setidaknya-kurangnya 30% untuk kuota di tingkat DPRD. Perempuan hampir tidak pernah terwakili dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk mencapai proses demokrasi yang baik, baik perempuan maupun laki-laki dua kategori politik utama sangat perlu terwakili dalam politik. Dibandingkan dengan laki-laki, elit politik perempuan memiliki cara pandang yang berbeda dalam pengambilan kebijakan dan orientasi yang berbeda. Maka dari itu kesadaran di dalam sebuah organisasi untuk mengikutsertakan perempuan sangatlah di perlukan. Selain itu keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan public. Selain itu juga akan membawa perempuan cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan berresponsif gender Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang- undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender. (Wahyudi, 2018)

Di Indonesia tidak sedikit instansi pemerintahan yang mengikutsertakan perempuan di dalamnya namun sampai saat ini belum ada instansi pemerintahan yang berhasil menempatkan perempuan pada 30% minimal keterwakilan perempuan di dalamnya, yang masih sangat tertinggal dan pada tahun 2009 Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan jumlah keterwakilan perempuan yang hanya 18%. Adapun bukti dari kebijakan *affirmative action* yang dapat menjawab persoalan tentang peningkatan keterwakilan perempuan minimal 30% yang berhasil dilakukan oleh dua puluh empat negara yang berhasil memenuhi keterwakilan

perempuan salah satu negara yang mencapai angka di atas minimal kuota 30% yaitu Rwanda (56,3%) dan Swedia(45%) (Budiarti, 2011).

Dan berdasarkan Q.S Al Hujarat Ayat 13 yang berbunyi tentang:

“Bahwasannya seorang laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing”

Di dalam kelembagaan legislatif tentunya terdapat partai politik yang terkait di dalamnya yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang nantinya akan merekrut kandidat kandidat yang di usungkan sebagai bakal calon dari partai politiknya masing-masing. Karena fungsi lembaga perwakilan ditentukan oleh fungsi rekrutment partai yang kemudian membentuk fraksi-fraksi di parlemen. Ada 8 parpol yang aktif di dalam kelembagaan legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang di antaranya ada fraksi Gerindra, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Golkar, PPP, PDIP, Demokrat, PAN dan PKS. Dan di dalamnya diisi oleh para aktor politik laki-laki maupun perempuan, dari 8 partai politik yang ada di lembaga legislatif khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dalam Pileg tahun 2019, beberapa parpol mengusungkan calon yang mewakilkan perempuan yang akan terlibat di dalamnya.

Kemudian dalam hal ini di lansir dari *kabarpriangan.com* pada pemilu 2019 KPU Kabupaten Tasikmalaya mencatat jumlah DPT (Daptar Pemilih Tetap) yang ada di kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 1.339.956 pemilih. Dan untuk pemilih laki-laki berjumlah 676.434 untuk pemilih perempuan berjumlah 663.552 pemilih. Dapat kita simpulkan bahwa jumlah kuantitas antara laki-laki dan perempuan itu hampir seimbang. Tetapi jika di lihat dari kuantitas jumlah pemilih yang hampir sama keterwakilan perempuan belum mampu mewakili secara proposional di dalam bidang manpun termasuk DPRD.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terpilih Pada Pileg Menurut Partai Politik Dan Jenis kelamin 2019-2024

Partai Politik	Anggota		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Gerindra	8	1	9
PKB	7	1	8
Golkar	7	0	7
PPP	7	0	7
PDI-P	5	2	7
Demokrat	5	0	5
PAN	3	2	5
PKS	1	2	3
Total	43	7	50

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 1. 2 Nama-Nama Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu 2019-2024

Tabel 1.2 1 Dapil I

Dapil I, 8 Kursi.			
NO	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Jejeng ainal Mutaqqin S.HI.,MSI.	8469
2	PKB	M Hakim Zaman	10.605
3	Gerindra	Endang Jakaria S.Sos, M.SI	3.934
4	PDIP	Hj Ai Sugianto	5.803
5	Golkar	Drs Erry P, M.SI	7.836
6	PAN	Yane Sriwigantini	5.958
7	PPP	H Apip Permadi, S.Pd, I., M.I.Pol	5.226
8	Demokrat	Candra	7.488

Tabel 1.2 2 Dapil II

Dapil II, 7 Kursi			
NO	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Ami Fahmi ST	4.928
2	Gerindra	H Cecep Ruhimat	10.263
3	PDIP	Nanang Romli	8.256
4	Golkar	Drs H Asep Husein	3.502
5	PKS	H Dedi Kurniawan ST.MM	3.809
6	PPP	Asop Sopiudin S.Ag	5.717
7	Demokrat	M Sulton Maliki	6.189

Tabel 1.2 3 Dapil III

Dapil III, 6 Kursi			
NO	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Acep S.IP	6.955
2	Gerindra	Dadang Rahmat Alfaruq, S.Pd.I, MH	3.792
3	Golkar	Moch Arif Arseha SE	6.117
4	PKS	Hj Ucu Dewi Sarifah S.IP	3.674
5	PPP	H Doni Hamdani SE	6.388
6	PAN	Mamat Rahmat	3.339

Tabel 1.2 4 Dapil IV

Dapil IV, 7 Kursi			
NO	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	H Gumelar Ahmad Purbawisesa	6.303
2	Gerindra	Deni Daelani	5.404
3	PDIP	Mukarom,.	3.638
4	Golkar	Aang Budiana,. S.Ag	11.204
5	PPP	Sihabudin	8.660
6	PAN	Asep zulfikri,. SE	4.946
7	Demokrat	Ferry Wiliam ST	7.786

Tabel 1.2 5 Dapil V

Dapil V, 7 Kursi			
No	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Sri Susilawati	8.832
2	Gerindra	Asep Sopari Al Ayubi SP	6.449
3	PDIP	Ucu Subandri	4.114
4	Golkar	Asep Saepulloh ST.MM	5.853
5	PKS	Robby Hermawati S.Si	4.554
6	PPP	H. Cecep Nurul Yakin	6.038
7	PAN	Ucu Mulyadi SP.	6.314

Tabel 1.2 6 Dapil VI

Dapil VI, 8 Kursi			
No	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Asep Muslim	5.314
2	Gerindra	Hari Somantri S.Sos	6.905
3	Gerindra	Yayat Hidayat S.Pd	7.260
4	PDIP	H. Demi Hamjah	6.466
5	Golkar	Drs. Ending Sunaryo Mm.	5.632

6	PPP	Hidayat Muslim Se.	5.233
7	PAN	Ratna Dwi Se.	5.543
8	Demokrat	H. Ejen aenal Muttakin S.Pdi	4.779

Tabel 1.2 7 Dapil VII

Dapil VII, 7 Kursi			
No	Nama Partai	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	Syahban Hilal Sh.,M.Pd	2.873
2	Gerindra	H. Agus Sutiana AKA	7.889
3	Gerindra	Wida Otiva	3.658
4	PDIP	Lina Marlina	4.331
5	Golkar	Dani Ferdian S.Ip	7.787
6	PPP	Zaenal Abidin	2.926
7	Demokrat	H. Cecep Nur Yakin S.PD.,M.Si	7.780

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya

Dari tabel di atas yang merupakan jumlah keseluruhan anggota Legislatif yang telah terpilih pada Pileg priode 2019-2024, terdpat 50 anggota legislatif dari 8 partai politik yang terpilih menjadi anggota dewan, dapat kita ketahui bahwa keterwakilan perempuan yang ada sangat minim dan hanya berjumlah 7 orang dari keseluruhan partai politik yang mengusung kandidatnya, jika di presntasikan dari hasil pemilihan anggota yang masuk menjadi anggota dewan jumlah perempuan hanya 14% yang terlibat dalam keterwakilan perempuan yaitu dari partai Gerindra,PKB,PDI-P,PAN dan PKS. Di bandingkan dengan laki-laki yang mendominasi keterwakilan tersebut sebanyak 43 anggota parlemen dan jika di prsentasikan sebanyak 86% keterwakilan laki-laki. Adapun salah satu partai yang ingin Peneliti analisis lebih jauh yang mengaitkan keterwakilan perempuan pada pileg serentak ini yaitu partai PDIP.

Keikut sertaan anggota yang di usungkan oleh Partai PDI-P dalam pileg 2019 yang berhasil dan mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, untuk perempuannya berjumlah 2 orang, kemudian untuk laki-lakinya berjumlah 5, jadi totalnya berjumlah 7 orang. Dari 2 orang yang terpilih dalam pemilihan umum akan menjadi permasalahan faktor apa saja yang menjadi kemenangan untuk 2 orang perempuan tersebut, akan tetapi tidak hanya di lihat dari faktor kemenangannya saja pastilah akan di bandingkan dengan faktor minimnya juga karena dalam hal ini

bisa di simpulkan bahwa keterwakilan atau peran perempuan juga kurang dalam perpolitikan daerah khususnya di partai PDIP. Dilihat dari PDIP di Tasikmalaya mayoritas masyarakat yang banyak mendukung PDIP kemudian PDIP yang di anggap partai yang besar dan bergengsi yang telah banyak memunculkan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah seperti halnya ibu Megawati yang merupakan satu satunya wanita yang menjadi Presiden kemudian ibu Puan yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI dan bisa di lihat bahwa PDIP memiliki elektabilitas Yang kuat di banding partai lain, dan jika di lihat kenapa PDIP kalah dengan Gerindra yang menjadi partai unggul dalam pemenuhan suara di pemilu 2019. walaupun di Tasikmalaya sendiri memang representasi keterwakilan perempuannya sama, tetapi menjadi tantangan untuk saya meneliti lebih jauh terkait partai yang saya anggap bakal naik daun, tapi kenapa kuantitasnya tidak beda jauh dengan partai lain. Dalam permasalahan ini, bisa di lihat bahwa kesadaran dalam berpolitik tentunya harus di jujung tinggi serta peran ataupun partisipasi bagi perempuan khususnya harus ditingkatkan kembali. Apalagi dalam sebuah organisasi parpol haruslah mempunyai suatu pergerakan untuk menciptakan kader-kader yang kompetitif sehingga akan lahir generasi-generasi yang unggul dalam meraih tujuan dari parpol itu sendiri.

Dari permasalahan diatas yang telah di paparkan oleh penulis mengenai *ANALISIS KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus: Keterwakilan Perempuan Pada Partai PDIP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Priode 2019-2024)*. Penulis ingin lebih tahu dan menganalisis bagaimana permasalahan yang ada di dalamnya sehingga dapat menemukan titik terang terkait keterwakilan perempuan pada salah satu partai dilembaga parlemen.

B. Rumusan Masalah

Dari yang telah di jelaskan di atas dalam latar belakang masalah, dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan secara menyeluruh dan kompherensif semua aspek yang terkait dengan eksistensi dan keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pileg anggota DPRD dalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam negara demokrasi dan mewujudkan

kesetaraan gender, dengan mengambil kasus keterwakilan politik perempuan pada fraksi PDIP DPRD kabupaten Tasikmalaya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan Di DPRD Kabupaten Tasikmalaya?
2. Mengapa keterwakilan politik perempuan pada partai PDIP di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masih tergolong minim?
3. Faktor apa saja yang Menjadi Kemenangan Dua Anggota Perempuan Partai PDIP DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya?
2. Mengetahui alasan kenapa keterwakilan politik perempuan pada partai PDIP di DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong minim?
3. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kemenangan dua anggota perempuan partai PDIP di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu 2019?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan sebuah manfaat dari tulisannya baik untuk pembaca maupun untuk organisasi yang bersangkutan serta bagi masyarakat luas. Kemudian dalam manfaat penelitian ini ada 2 macam manfaat yaitu:

1. Teoritis

Dapat kita pahami bahwasannya manfaat teoritis ialah sebuah tujuan penelitian yang verifikasi untuk memverifikasi sebuah teori yang sudah ada. Karena itu manfaat teoritis muncul akibat dari seorang peneliti yang kurang puas atau kurang yakin dengan suatu teori tertentu. Maka dalam hal ini dapat diharapkan untuk di pakai sebagai sebuah pertimbangan ataupun acuan untuk penelitian empiris.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian praktis ini Manfaat peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kaum perempuan dalam keterwakilan politik pada fraksi

PDIP di DPRD kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti serupa di masa yang akan datang serta mampu menambah body of knowledge.

